

**BAB 2**  
**ALASAN HIJRAH DIVISI SILIWANGI DARI JAWA BARAT**  
**KE JAWA TENGAH**

**2.1 Divisi Siliwangi**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini lahir ditengah desakan keadaan karena mereka harus melakukan perlawanan terhadap Belanda yang menginginkan Indonesia kembali jatuh ketangannya. Didirikannya TNI ini juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kedaulatannya setelah perang kemerdekaan. Sedangkan untuk personil TNI ini pada awalnya bekas personil angkatan bersenjata Kolonial Belanda yang dinamakan KNIL (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*) yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang kemiliterannya.<sup>21</sup>

Selain KNIL yang dijadikan sebagai perwira TNI pada saat itu, PETA (Pembela Tanah Air) memiliki peran pada terbentuknya TNI. PETA dibentuk pada masa penjajahan Jepang. Jika dibandingkan dengan KNIL yang memiliki masa militer yang lama, PETA hanya memiliki pengalaman hanya 2 tahun saja. Terlepas dari pengalaman yang singkat, PETA memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta jiwa anti-barat yang tinggi pula.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mulyer Mananda Setyahadi, *Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, Jurnal Renaissance Vol. 3 No.1, 2018, hlm. 346.

<sup>22</sup> Atno, Nanda Julian Pratama, *Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947*, Jurnal Sejarah, 2018, hlm. 13.

Penamaan TNI mengalami perubahan beberapa kali yang awalnya adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945. BKR ini dibentuk karena pasca kemerdekaan Indonesia mengalami kesulitan dalam bidang keamanan.

Kemudian BKR ini dirubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Meskipun namanya berubah, dalam segi kepentingan TKR ini masih tetap sama seperti sebelumnya yaitu untuk mengatasi situasi yang mulai terancam dengan adanya Belanda di Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1946 TKR resmi dirubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Hal ini karena banyaknya laskar-laskar perjuangan yang bentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing. Sehingga ditegaskanlah bahwa organisasi militer satu-satunya adalah TRI. Hingga pada akhirnya TRI ini dirubah oleh Soekarno menjadi Tentara Nasional Indonesia.

*“Divisi Siliwangi itu lahir sebagai akibat daripada Proklamasi rakyat Indonesia, seperti halnya divisi-divisi lainnya di berbagai-bagai tempat di wilayah Tanah Air. Dilahirkanlah sebagai suatu keharusan yang tidak boleh tidak harus ada.”<sup>23</sup>*

Arti dari kelahiran Divisi Siliwangi ini tidak terlepas dari lahirnya TNI dan dapat dikatakan bahwa Divisi Siliwangi ada karena TNI ada. Hal ini Divisi Siliwangi merupakan kesatuan rakyat yang bersatu menjadi tentara di bagian Jawa Barat. Divisi Siliwangi ini resmi dilantik pada tanggal 20 Mei 1946.

---

<sup>23</sup> Surdjono Dirdjosisworo, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, (Bandung: KODAM III, 1994), hlm. 9.

Personil dari Divisi Siliwangi ini banyak sekali dari tenaga-tenaga kader yang aktif berasal dari PETA, Heiho, Kaigun dan KNIL. Mereka telah mengesap pendidikannya di sekolah menengah maupun sekolah tinggi pada zaman Belanda.<sup>24</sup> Dapat dikatakan bahwa kualitas dari personil Divisi Siliwangi ini memiliki pengalaman yang baik dalam bidang kemiliterannya. Sehingga Divisi Siliwangi ini dikenal baik oleh seluruh rakyat Indonesia karena ikut andilnya dalam menjaga keamanan Indonesia pasca kemerdekaan. Penamaan Siliwangi ini diambil dari nama Prabu Siliwangi yang merupakan nama tokoh yang pernah berkuasa pada tahun 1474-1513 yang memiliki sifat arif dan bijaksana. Prabu Siliwangi juga dikenal keberhasilannya dalam memajukan negara Kerajaan Padjajaran.<sup>25</sup>

## 2.2 Kondisi Divisi Siliwangi sebelum Hijrah

Kondisi politik Indonesia pada saat itu menghadapi perbedaan ideologi yang dianut oleh tokoh Indonesia yaitu kelompok kiri menginginkan bangsa Indonesia bergabung dengan Komunis Internasional sedangkan pemimpin nasional tidak ingin dikuasai oleh komunisme.<sup>26</sup> Kabinet Syahrir yang pada saat itu sebagai delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Kegagalannya dalam Perjanjian Linggarjati menganggap bahwa Indonesia telah menjualnya ke tangan Belanda merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Panitya Hut Kodam III, *Dharma Bhakti dan Karya Juang Siliwangi*, (Bandung: KODAM III Siliwangi, 1991), hlm. 16.

<sup>25</sup> Surdjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> Ibnu Khaldun dan Edy Suparjan, *Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1), 2021, hlm. 125.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Hadirnya Divisi Siliwangi tentu menjaga Republik Indonesia dari serangan Belanda yang bertujuan untuk merebut kembali Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa Agresi Militer I yang merupakan bentuk pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Linggarjati yang telah disetujui antara Belanda dan Indonesia sebelumnya. Jawa Barat merupakan sasaran utama yang diserang oleh Belanda, hal ini karena Belanda ingin membentuk “Negara Pasundan” demi menyederakan jalannya siasat “*divide et impera*”.<sup>28</sup>

Agresi Militer I tidak dapat menghancurkan Divisi Siliwangi, hal ini karena Divisi Siliwangi menggunakan strategi kode “perintah” (palsu) bahwa Divisi Siliwangi berkapitulasi.<sup>29</sup> Berita ini terdengar sampai ke pimpinan Yogyakarta yang pada akhirnya membentuk Divisi “Bambu Runcing” untuk membantu Divisi Siliwangi.<sup>30</sup> Kabar kapitulasi ini juga membuat rakyat Jawa Barat sakit hati dan kecewa terhadap Divisi Siliwangi. Pada kenyataannya, Divisi Siliwangi berhasil menduduki wilayah yang diduduki oleh Belanda.

Kekacauan atas Agresi Militer I ini membuat PBB mengeluarkan perintah untuk menghentikan tembak menembak, namun pihak Belanda tidak mau menghentikannya bahkan merencanakan untuk memperluas wilayah Garis Van

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 22.

<sup>29</sup> Surdjono Dirdjosisworo, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, (Bandung: KODAM III, 1994), hlm. 91.

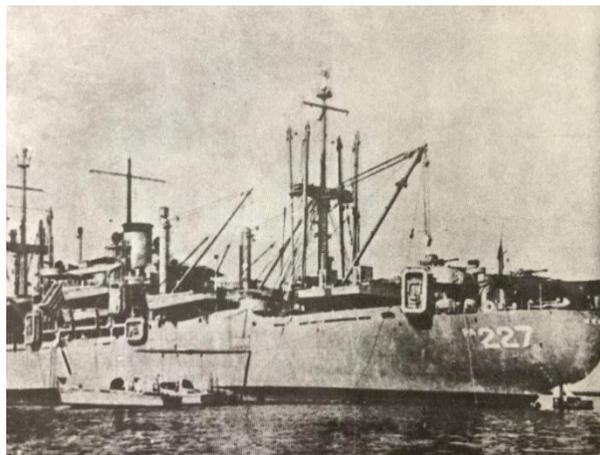
<sup>30</sup> *Ibid.*

Mook.<sup>31</sup> Solusi menghentikan Agresi Militer I dengan mengadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia yaitu Perjanjian Renville.

Kondisi Divisi Siliwangi sebelum hijrah yaitu mereka dihadapkan dengan perlawanan setelah kemerdekaan Indonesia yaitu Agresi Militer I. Divisi Siliwangi berusaha mempertahankan Jawa Barat dari serangan Belanda. Namun aksi tembak menembak ini tidak dapat dihentikan, maka diadakanlah perundingan yang bertujuan untuk meredam peristiwa tersebut.

### 1.6 Pelaksanaan Perjanjian Renville

Divisi Siliwangi melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Timur pengaruh dari kekalahan Indonesia melawan Belanda atas Perjanjian Renville yang dilaksanakan diatas kapal UUS Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hijrah ini bukan diartikan sebagai bentuk pelarian diri bangsa Indonesia dari kekealahannya, melainkan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara menaati isi Perjanjian Renville.



---

<sup>31</sup>Panitya Hut Kodam III, *Op.Cit.*, hlm. 23

Gambar 2.1 Kapal Renville  
(sumber: Arsip Dokumentasi Disjarahad)

Perjanjian Renville ini ada diharapkan sebagai bentuk penyelesaian akibat dari kekacauan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan Indonesia yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini diadakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda melalui diplomasi. Namun perjanjian ini dilanggar oleh Belanda dengan cara Agresi Militer I ke Indonesia. Pengkhianatan Belanda ini dilakukan bertujuan untuk merebut kembali Indonesia.



Gambar 2.2 Ketua Delegasi RI menyampaikan pidatonya  
(sumber: Arsip Dokumentasi Disjarahad)

Awal perundingan ini dimulai dengan penyampaian pidato dari setiap perwakilannya dan Amir Syarifudin berkata bahwa adanya Perjanjian Renville ini penentuan Indonesia di masa datang.<sup>32</sup> Rasa optimis yang dimiliki oleh Amir Syarifudin dalam pidatonya karena perundingan yang diikutinya didukung oleh rakyat

---

<sup>32</sup> Ervani, Sumiyatun, Kuswono, *POLITIK DIPLOMASI PERDANA MENTERI AMIR SYARIFUDIN DAN PERJANJIAN RENVILLE*, *Junal Swarnadwipa*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 24.

Indonesia dan menaruh harapan besar bahwa Indonesia bisa selesai dari pertikaian antara Indonesia dan Belanda.<sup>33</sup> Ujung dari perundingan ini membuat Amir Syarifudin merasakan penyesalan yang sangat besar karena banyak pihak yang dirugikan dari perundingan tersebut.<sup>34</sup>

Pada kenyataannya Perjanjian Renville ini menjadi titik terlemah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Perundingan ini yang diwakili oleh Amir Syarifudin yang pada saat itu diberi mandat sebagai Perdana Menteri. Perundingan ini berjalan dengan alot karena perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Belanda. Selama perundingan ini berlangsung, Amir Syarifudin tentu melakukan diskusi-diskusi dengan para tokoh terdahulu dengan tujuan menghindari kesalahan dalam memilih langkah karena kondisi Indonesia kini sudah terjepit karena beberapa faktor diantaranya Belanda berada diposisi negara yang kuat dan Indonesia yang baru medeka masih terbilang lemah.<sup>35</sup> Perbandingan posisi antara Belanda dengan Indonesia yang tidak seimbang sehingga dimanfaatkan oleh Belanda dengan memberikan tekanan secara terus menerus kepada Amir Syarifudin dan serangan-serangan kepada Indonesia yang berujung penandatangan perundingan pada tanggal 17 Januari 1948.

Garis Van Mook merupakan garis demarkasi wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda oleh Van Mook pada tanggal 1 Agustus 1947 yang diumumkan secara sepihak. Pihak Indonesia tidak mengakui adanya Garis Van Mook karena beranggapan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 26.

bahwa wilayah yang digarisi ini dibawah kekuasaan kedua belah pihak hal ini karena Tentara Indonesia beroperasi dalam garis tersebut.<sup>36</sup> Perjanjian Renville menitikberatkan wilayah-wilayah yang diakui oleh Belanda dan mempersempit kekuasaan Indonesia.

Hasil dari Perjanjian Renville delegasi Indonesia menyetujui gencatan senjata disepanjang Garis Van Mook yang merupakan garis penghubung titik-titik pihak Belanda yang dibelakang garis tersebut terdapat wilayah Republik Indonesia. Titik permasalahannya adalah Garis Van Mook yang tidak diterima oleh Republik Indonesia justru disetujui oleh Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia. Wilayah yang termasuk kedalam Garis Van Mook terdapat Jawa Barat, hal ini karena Jawa Barat merupakan wilayah yang diperhatikan perkembangannya oleh pihak Belanda untuk mendirikan negara Pasundan.<sup>37</sup> Maka dari itu, Divisi Siliwangi ditarik mundur dari Garis Van Mook.



Gambar 2.3 Wilayah Indonesia setelah Perjanjian Renville (sumber: Arsip Dokumentasi Disjarahad)

<sup>36</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 54.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 77-78.

Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa dengan Perjanjian Renville ini membuat wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit. Peta tersebut juga menunjukkan bahwa Jawa Barat termasuk kedalam wilayah Garis Van Mook. Pada akhirnya Jawa Barat berhasil dikuasai oleh Belanda atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia.

#### **2.4 Dampak Perjanjian Renville**

Dampak dari adanya Perjanjian Renville yaitu rasa kecewa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia termasuk Tentara Indonesia yang didalamnya Divisi Siliwangi. Rakyat Indonesia menyalahkan Amir Syarifudin dan menganggap gagal dalam membuat kesepakatan dengan Belanda. Tekanan yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Amir Syarifudin membuatnya mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Dampak lain dari Perjanjian Renville ini berpengaruh terhadap nasib Divisi Siliwangi yang mengharuskan mundur dari Jawa Barat yang menjadi wilayah kekuasaan Belanda yang dibatasi Garis van Mook dan berpindah ke wilayah kekuasaan Indonesia yang diakui oleh Belanda yaitu Jawa Tengah. Belanda menganggap bahwa keberadaan Divisi Siliwangi di Jawa Barat ini menjadi hambatan untuk merebut kembali Indonesia.

Pada tanggal 17 Januari 1948 Panglima Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan melalui perintah harian, isi dari perintah tersebut diantaranya:

1. Hindarkan segala provokasi berupa apapun juga,
2. Meneruskan tugas mejamin keamanan dan ketentraman dalam daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab Angkatan Perang republik Indonesia,
3. Mempertahankan diri apabila diserang,
4. Menghindarkan segala insiden,
5. Insyaf, bahwa Angakatan Perang Republik Indonesia tetap bertanggung jawab atas keamanan, jiwa dan harta.<sup>38</sup>

Adanya persetujuan tersebut juga, maka hijrah yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi diatur sebagai berikut:

1. TNI diberi batas waktu satu minggu untuk meninggalkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke daerah kekuasaan Republik Indonesia,
2. Meninggalkan daerah penduduk Belanda dalam batas waktu satu minggu,
3. Bagian pasukan Divisi Siliwangi yang tidak diperintahkan hijrah, mereka berjalan kaki menuju Banten.<sup>39</sup>

Divisi Siliwangi akhirnya menuruti perintah Jenderal Soedirman, bukan hanya menghindari konflik yang berkelanjutan melainkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Divisi Siliwangi juga memiliki dasar kedisiplinan yang tinggi, meskipun dengan rasa kecewa tetapi taat dalam menjalankan perintahnya.

---

<sup>38</sup> Dinas Sejarah Militer TNI – Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI – Angkatan Darat*, (Jakarta: Percetakan Offset Virgosari, 1972), hlm. 142.

<sup>39</sup> Surdjono Dirdjosisworo, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, (Bandung: KODAM III, 1994), hlm. 123.